

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN 2024

LKJIP 2024



DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR

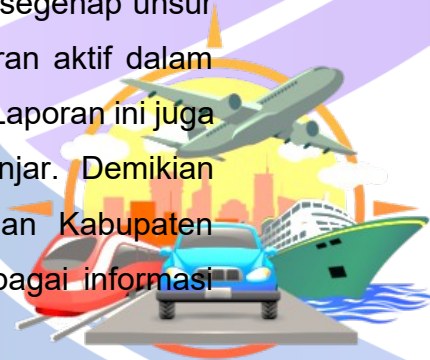
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang



ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya mengacu pada tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada bidang transportasi, serta sebagai unsur staf Bupati Banjar yang professional, responsif dan akuntabel, Dinas Perhubungan telah menjalankan serangkaian program dan kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Perhubungan sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Bupati Kabupaten Banjar. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.

Terima kasih.





Martapura, 29 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar



Dr. I GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19671210 199010 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1
A.1 Maksud Laporan	1
A.2 Tujuan Laporan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B.1 Tugas Pokok	1
B.2 Fungsi	1
B.3 Dasar Hukum	15
B.4 Struktur Organisasi	16
B.5 Kepegawaian	17
C. Isu Strategis	20
D. Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Indikator Kinerja Utama	22
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	44
A.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024	44
A.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	59
A.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Periode Renstra	67



A.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional	72
A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	76
A.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87
A.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	90
A.9 Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024	107
A.9.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2024	107
A.9.2 Tindak Lanjut	114
B. Realisasi Anggaran	116
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran – Saran	128
LAMPIRAN	132





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2024	23
Tabel 2.2	Indikator Kerja Utama Tahun 2024	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 3.1	Target Dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	44
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja	46
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2024	47
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi / Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	60
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra	67
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional	72
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	87
Tabel 3.8	Realisasi Jenis Belanja	116
Tabel 3.9	Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	116
Tabel 3.10	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	121





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kab Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada 2 sasaran strategis masuk pada kategori cukup berhasil.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :





1. Meningkatkan sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan
2. Meningkatkan keterpenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan

Dari 2 (dua) sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program wajib, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar 97%.
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi sebesar -1,37%.
3. Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar sebesar 140%.

Total anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.128.478.967,00 dengan realisasi sebesar 16.478.393.680,00 (90,90%). Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp 10.815.122.753 dengan realisasi sebesar Rp 9.538.779.171 (88,20%) sedangkan anggaran untuk Program urusan perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp 5.465.358.314 dengan realisasi sebesar Rp 5.103.185.809 (93,37%) dan Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp 1.847.997.900 dengan realisasi sebesar Rp 1.836.428.700 (99,37%).

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap



perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala/permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal/keuangan, semua program/kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Martapura, 29 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar



Dr. I GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19671210 199010 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Perhubungan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 TUGAS POKOK:

Dinas Perhubungan (Dishub) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

B.2 FUNGSI:

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dishub; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Sebagai Berikut:

- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;



- j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perhubungan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku

Uraian Tugas bidang dan seksi serta fungsional di Dinas Perhubungan:

Sekretariat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b) memonitor pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c) menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai Tata Naskah Dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :



- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
- g) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i) menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas.
- j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k) membuat Daftar Urut Kenaikan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
- l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;
- m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :



- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
- d) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e) Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- f) menyusun Profil Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h) Menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- i) menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan PMPRB serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas; dan
- j) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- l) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;



- n) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran.
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis.
- c) mengkoordinasikan kegiatan
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait.
- e) menyelenggarakan urusan teknis
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan
- b) Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan.
- e) melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang teknologi kendaraan dan perbengkelan;
- f) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan darat di wilayah kabupaten.
- g) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk angkutan perkotaan dan atau perdesaan dan pelabuhan Pengumpan Lokal;



- h) menyiapkan bahan rekomendasi, pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP);
- i) Melaksanakan pekerjaan pembersihan alur di wilayah perairan dan atau wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- j) membuat rekomendasi terhadap karoseri sarana kendaraan bermotor yang akan diuji ulang untuk pertama kali;
- k) melaksanakan administrasi dan membuat rekomendasi tentang status sarana kendaraan bermotor umum atau tidak umum, perubahan presentasi (nilai) perubahan bentuk dan perubahan kendaraan bermotor;
- l) menyediakan angkutan umum perintis untuk jasa angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah Kabupaten;
- m) melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran jumlah prasarana perbengkelan umum dan bengkel Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) swasta;
- n) Pembuatan surat keterangan kaca berwarna (film coating);
- o) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat, rencana umum dan rencana teknis integral atau pepaduan antar moda transportasi dan simpul-simpul transportasi darat;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jaringan dan fasilitas perhubungan darat;
- c) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat;
- d) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi darat;



- e) melaksanakan pengkajian, penelitian dan studi dalam rangka perkembangan transportasi darat;
- f) melaksanakan survey/pendataan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan, perhubungan darat di wilayah kabupaten;
- g) melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan Perhubungan darat rambu- rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas jalan, marka jalan, zebra cross, pita getar (rumble street), PJU serta tanda-tanda pada jalan di wilayah Kabupaten;
- h) membuat usul pengadaan, penempatan dan media dan alat pembantu pengamanan lalu lintas jalan (area traffic control system/ATCS) di wilayah kabupaten;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran;
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis;
- c) mengkoordinasikan kegiatan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ bidang terkait dalam kegiatan;
- e) menyelenggarakan urusan teknis;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;



- c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam rangka manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi Darat untuk pengembangan sistem transportasi di wilayah Kabupaten;
- e. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, sungai dan danau di wilayah kabupaten serta pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Melaksanakan pengkajian dan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas terhadap daerah Rawan Kecelakaan (DRK) lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- h. Melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan media dan alat bantu pengamanan lalu lintas jalan (Area Traffic Control Sytem/ ATCS);
- i. Menyiapkan bahan rekomendasi batas kecepatan maksimal, larangan pengguna jalan, dan dispensasi bagi jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib lalu lintas yang berada pada wilayah Kabupaten;
- j. Melaksanakan kegiatan penyusunan data kinerja lalu lintas jalan serta sungai dan danau (pendataan Lalu Lintas Harian Rata-Rata);
- k. Menyusun rekomendasi manajemen, analisa dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas terhadap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur



yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

- l. Melaksanakan manajemen dan pengawasan terhadap parkir di bahu jalan;
- m. Mengatur tentang kewajiban, memberikan bantuan kepada perkumpulan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta perlengkapan jalan lainnya;
- n. Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Keselamatan,Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan keselamatan lalu lintas di jalan dan perairan sungai dan danau;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan operasional dan pengendalian lalu lintas jalan dan perairan sungai dan danau;
- c) Melaksanakan pengawasan dan penyidikan penyelenggaraan Perda bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta pelanggaran pemeriksaan teknis dan laik jalan serta perizinan angkutan umum di terminal, jalan dan pelabuhan sungai dan danau;
- d) melaksanakan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, pengumpulan data kecelakaan lalu lintas di kabupaten banjar dan usulan rekomendasi penanggulangan;
- e) Melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Kabupaten Banjar;
- f) Melaksanakan kegiatan pembinaan/ penyuluhan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat, pelajar, pengemudi kendaraan bermotor serta pengemudi kapal;



- g) melaksanakan pengamanan dan penertiban jalur lalu lintas untuk acara-acara tertentu;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan, sungai dan danau untuk kepentingan lalu lintas;
- i) Melaksanakan patroli secara sendiri dan/ atau terpadu dengan instansi terkait pada jaringan jalan Kabupaten serta pengawalan bagi pejabat, tamu dan rombongan atau iring-iringan yang memerlukan pengawalan;
- j) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai dan danau;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran;
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis ;
- c) mengkoordinasikan kegiatan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan ;
- e) menyelenggarakan teknis urusan ;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan jalan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait angkutan jalan;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang angkutan jalan;



- d) menyiapkan bahan rencana kebutuhan jaringan angkutan umum, angkutan pelajar, serta rencana kebutuhan angkutan di wilayah operasional kabupaten;
- e) menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan jalan, tarif ekonomi untuk penumpang angkutan jalan dan jaringan trayek pedesaan yang ada di wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan orang dan barang di jalan dalam satu wilayah kabupaten;
- g) melaksanakan sosialisasi trayek baru, pembinaan sopir, angkutan pedesaan, dan trayek insidentil angkutan;
- h) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan angkutan jalan;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Angkutan Sungai dan Danau mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan sungai dan danau;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan sungai dan danau;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- d) menyiapkan penyusunan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten;
- e) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan sungai dan danau dalam satu wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan penetapan tarif ekonomi untuk penumpang angkutan sungai dan danau di wilayah Kabupaten;
- g) pelaksanaan dan pengembangan lokasi pelabuhan angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten;



- h) sosialisasi angkutan sungai dan danau (seperti: sosialisasi tarif angkutan sungai dan danau, sosialisasi perizinan angkutan sungai dan danau);
- i) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan penilaian teknis dan laik jalan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- d) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
- e) kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD.



- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Terminal dan Parkir;
- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan UPTD Terminal dan Parkir;
- c) memberikan izin pengelolaan parkir;
- d) melaksanakan penagihan/pemungutan retribusi daerah di lingkungan wilayah kerjanya;
- e) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Terminal dan Parkir; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal dan Parkir mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan Terminal dan Parkir;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Terminal dan Parkir; dan



- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.3 DASAR HUKUM:

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2024



7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

B.4 STRUKTUR ORGANISASI:

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka kalau dilihat dari struktur organisasinya termasuk ke dalam organisasi lini, staf dan fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terdiri dari:

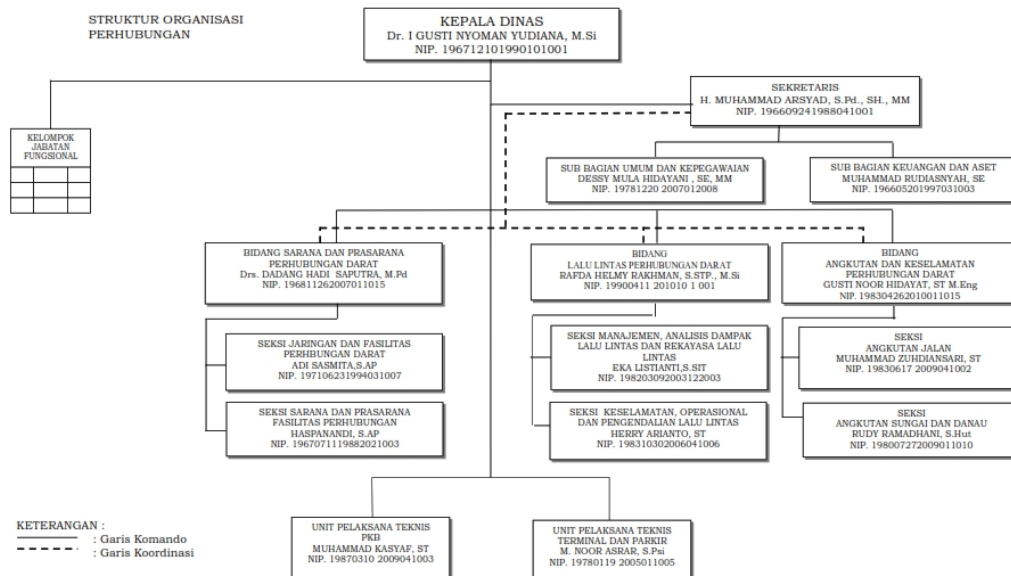
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari:
 1. Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
- d. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Keselamatan, Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas.
- e. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Jalan; dan



2. Seksi Angkutan Sungai dan Danau.

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

B.5 Kepegawaian:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam mendukung tercapainya target kinerja. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan selengkapnya bisa dilihat dibawah ini:

N O	NAMA PNS	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Dr. I Gt. NYOMAN YUDIANA, M.Si	19671210 199010 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas
2	H. MUHAMMAD ARSYAD, S.Pd, SH, MM	19660924 198804 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris
3	GUSTI NOOR HIDAYAT, ST M. Eng	19830426 201001 1 015	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Angkutan Keselamatan Perhub Darat



4	Drs. DADANG HADI SAPUTRA, M.Pd	19681126 200701 1 015	Penata Tk. I (IV/a)	Kabid Sarana & Prasarana PD
5	REFDA HELMY RAKHMAN, S.STP.M.SI	19900411 201010 1 001	PENATA TK.I (III/d)	Kabid Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat
6	MUHAMMAD KASYAF, ST	19870310 200901 1 003	PENATA TK. I (III/d)	Ka. UPT PKB
7	DESSY MULA HIDAYANI, SE, MM	19781220 200701 2 008	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Umpeg
8	HASPANADI, S. AP	19670711 199802 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Sarana & Prasarana Fasilitas Perhubungan
9	ADI SASMITA, S. AP	19710623 199403 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Jaringan & Fasilitas PD
10	RUDY RAMADHANI, S. Hut	19800727 200901 1 010	Penata Tk.I(III/d)	Kasi Angkutan Sungai dan Danau
11	MUHAMMAD ZUHDIANSARI, ST	19830617 200904 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Angkutan Jalan
12	M. NOOR ASRAR,S.Psi	197801 19200501 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Ka. UPT Terminal & Parkir
13	EKA LISTIATI, S. SiT	19820309 200312 2 003	Penata (III/c)	Kasi Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas
14	HERRY ARIYANTO, ST	19831030 200604 1 006	Penata (III/c)	Kasi Keselamatan Opdal
15	IQBAL SURYA WARDHANA, A.Ma	19881027 201001 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kabag Tata Usaha UPT PKB
16	DENI IRAWAN, S.Tr. Tra	19900222 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	Kasubbag. Tata Usaha Terminal dan Parkir
17	KHAIRAN SYAFARI	19700408 199003 1 009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Pungut Retrebusi
18	DIDID SOEPRIADI NOOR	19700824 199503 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Keselamatan Opdal
19	WULAN FAJARIANUR, S.Tr. Tra	19990317 202203 2 002	Penata Muda (III/a)	Peny. Prog. Angg & Pelaporan
20	EVIN SARI SARBUNAN,S.Tr. Tra	19990503 202203 2 006	Penata Muda (III/a)	Pengevaluasi Program & Kinerja
21	MUHAMMAD MAHDI,S.Tr.Tra	19970628 202302 1 001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan
22	FEBRIANA CATUR UTAMI, S.Tr. Tra	20000216 202302 2 003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan



23	MUHAMMAD IKHSAN HAPIZI	19700217 200701 1 012	Pengatur Tingkat I (II/d)	Juru Pungut Retrebusi
24	AEF SAEFUDIN	19810519 200801 1 012	Pengatur Tingkat I (II/c)	Pengadmistrasi LLAJ
25	M. FATHIR KAWAKIB, A.Md.LLAJ	19971024 201903 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Keselamatan Opdal
26	M. FARIS ABDILLAH, A.Md	19960907 201903 1 005	Pengatur (II/c)	Staf Perencanaan Keuangan dan Aset
27	DODIK EKO KRISDIANTO, A.Ma	19911019 201503 1 002	Pengatur (II/d)	Penguji KB. Terampil
28	HELDA WAHDINI, A.Md.Tra	20020223 202202 2 001	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
29	ALDI, A.Md.Tra	20000629 202203 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan
30	SUBHAN AKBAR ALI HAFIDZI, S.Tr.Tra	20001118 202403 1 001	Penata Muda (III/a)	Seksi Manajemen, Analisa Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas
31	SALWA NUR RAMADHANTI, S.Tr.Tra	20011130 202403 2 001	Penata Muda (III/a)	Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
32	MUHAMMAD NAUFAL DZAKIR, A.Md.Tra	20010802 202403 1 001	Pengatur (II/c)	Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat
33	MUHAMMAD KAMIL KHATAMI, A.Md.Tra	20010507 202403 1 001	Pengatur (II/c)	UPTD PKB
34	M. FITRI RAVIQI MUFTI, A.Md.Tra	20021206 202403 1 001	Pengatur (II/c)	UPTD PKB
35	MIZAN ADLY BUDIMAN, S.Sos	19860217 202421 1 006	PPPK (IX)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
36	NOVITA KURNIAWATI, A.Md	19950211 202421 2 032	PPPK (VII)	Pranata Komputer Terampil
37	HANIF AMRULLAH, S.Pd	19940912 202421 1 009	PPPK (IX)	Perencana Ahli Pertama
38	GUNAWAN EKA PERMANA	19850420 202421 1 006	PPPK (V)	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula
39	AHMAD FAHRIANNOR	19960111 202421 1 008	PPPK (V)	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula



40	MUHAMMAD REZEKI ANWAR	19961125 202421 1 010	PPPK (V)	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula
----	-----------------------	-----------------------	----------	--

C. ISU STRATEGIS

Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Perhubungan sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang perhubungan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar keselamatan.
2. Belum Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak.
3. Belum Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Belum Meningkatnya kelancaran lalu lintas.
5. Belum Meningkatnya Keselamatan Transportasi.
6. Belum Meningkatnya kelancaran lalu lintas.
7. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan.



8. Belum Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak.
9. Belum Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Perhubungan mengampu urusan perhubungan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Perhubungan mendukung



pencapaian misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi 2 : Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan sebanyak 1 indikator.

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	75,46



Tujuan Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan indikator tujuan Indeks Konektivitas. sedangkan sasaran Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan indikator sasaran Indeks Rasio Konektivitas.

Tujuan dari Dinas Perhubungan adalah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dan memperbaiki konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur wilayah yang dimaksud meliputi pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, serta fasilitas transportasi lainnya yang vital untuk kelancaran pergerakan barang dan orang. Konektivitas yang baik antar wilayah memungkinkan mobilitas yang lebih efisien, yang berpengaruh langsung terhadap lancarnya distribusi barang, peningkatan akses ke pasar, serta kemudahan akses terhadap berbagai layanan sosial dan ekonomi.

Indeks Konektivitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah, yang meliputi jarak tempuh, waktu perjalanan, dan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai Indeks Konektivitas, semakin baik pula integrasi antar wilayah, yang mempengaruhi peningkatan produktivitas ekonomi.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Keterjangkauan daerah untuk mencapai moda transportasi darat dan sungai	$((IK1 \times \text{persentase bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{persentase bobot angkutan sungai}))$	Dinas Perhubungan



Sumber: Surat Keputusan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulasi perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	((IK1 x persentase bobot angkutan jalan) + (IK2 x persentase bobot angkutan sungai))	86,67	Rasio			KEPALA DINAS
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Nilai IKKI dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	76	indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp36.966.000	Sekretaris
						Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp5.929.056.692	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp7.200.000	

						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp50.000.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp353.157.300	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.175.624.935	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.745.275.026	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp517.842.800	
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase terpenuhinyaa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.435.000	Kasubag Perencanaan
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp13.657.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp4.870.000	

						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.004.000	
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.808.473.972	
5	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Presentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.	Persentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp111.780.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.802.720	
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp50.000.000	Kasubag Umum dan Perencanaan

7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp20.298.800	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp20.604.000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp14.024.500	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp10.750.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp287.480.000	
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%	100	Persen	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.002.274.935	
						Pengadaan Mebel	Rp56.124.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp116.776.000	
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa	100	Persen	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp74.440.026	

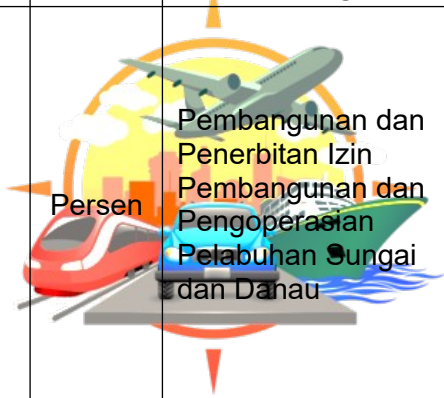
		yang terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.670.835.000	
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp38.990.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp351.390.000	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp28.620.000	
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp98.842.800	
11	Terpenuhi	Persentase	(Bobot	75	persen	Kegiatan Penyediaan	Rp1.748.975.000	Kepala

	Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	keterpenuhan terminal x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Perlengkapan jalan x realisasi ketersediaan perlengkapan jalan)			Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Bidang Sarana dan Prasarana
12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang memenuhi Standar	(Bobot sarana transportasi sungai dan danau x realisasi sarana transportasi sungai dan danau) + (Bobot prasarana transportasi sungai dan danau x realisasi prasarana transportasi sungai dan danau)	75	persen	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.298.275.900	
13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	80	Pesen	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp237.164.500	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan	Jumlah Dermaga/Shelter *bobot 20% + Kondisi Dermaga * bobot 20% +	70	Persen	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp31.633.800	

	serta perencanaan dan pengawasan ASDP	Danau sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan * bobot 20% + Pengawasan * bobot 20% + Fasilitas Perlengkapan * 20%					
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp51.499.400	
						Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.246.776.500	
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	75	persen	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.386.933.313	Kepala Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp93.244.000	
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan sesuai perhitungan	0,38	Indeks	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp2.159.300.773	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat

			MKJI					
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp23.497.000	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp37.000.000	
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan sesuai perhitungan MKJI	0,38	Indeks	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp30.000.000	Kepala Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Rp4.996.000	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Rp1.211.718.265	
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp533.852.508	
18	Meningkatnya	Persentase	Objek wajib	70	Persen	Koordinasi dan	Rp4.998.000	

	ketaatan terhadap peraturan andalalin	objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100%			Sinkronisasi Penilaian Hasil Anadalalin		
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan teknis Andalalin	Rp14.999.000	
						Penilaian Kompetensi penilai andalalin	Rp3.500.000	
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	kondisi yang diharapkan (100%) dikurangi persentase jumlah pelanggaran	84,44	Persen	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	Rp37.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Operasional Pengendalian
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp378.734.000	
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan	(Bobot angkutan umum x realisasi angkutan umum) + (Bobot PKB x Realisasi PKB)	70,11	Persen	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	Rp413.990.900	Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan

		Teknis dan Administrasi (sarana)				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Darat
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Jumlah angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan dan kelaikan kapal di bagi jumlah angkutan sungai dan danau yang ada dikali 100 %	30	Persen	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.000.000	
						Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp319.722.200	
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Jumlah Dermaga/Shelter *bobot 20% + Kondisi Dermaga * bobot 20% + Perencanaan * bobot 20% + Pengawasan * bobot 20% + Fasilitas Perlengkapan *	75	 Persen	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp229.999.800	

			20%					
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100 %	50	Persen	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp304.996.200	Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Danau
24	Menigkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dermaga/Shelter *bobot 20% + Kondisi Dermaga * bobot 20% + Perencanaan * bobot 20% + Pengawasan * bobot 20% + Fasilitas Perlengkapan * 20%	67	Persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp14.726.000	
						Pengoperasian dan	Rp229.999.800	

						Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100 %	37,5	Persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp31.538.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Jumlah Dokumen yang Direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan	100	Persen	 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp367.080.000	
						Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.000.000	

27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	(Jumlah Kendaraan yang lulus uji per tahun/jumlah kendaraan yang diuji)*100%	100	Persen	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp945.266.600	Kepala UPT PKB
28	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	(Jumlah Kendaraan yang lulus uji per tahun/jumlah kendaraan yang diuji)*100%	100	Persen	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp399.569.900	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PKB
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp499.372.700	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp46.324.000	
29	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	(Jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia/jlh fasilitas penyelenggaraan	59	Persen	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp50.843.928	Kepala UPT Terminal dan Parkir

			terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)*100%					
30	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	100	Persen	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp52.715.500	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp18.768.000	
31	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar		63	Persen	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp50.843.928	Kepala Sub Bagian UPT Terminal dan Parkir

32	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola		100	Persen	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp52.715.500	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp18.768.000	





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN TAHUN 2024

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mendukung tujuan Kabupaten Banjar dalam hal “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi”. Target dan realisasi kinerja tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN TAHUN 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	75,46	84,44

A.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan



kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran



keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:





Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	86,67	Rasio	89,99	104%	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	76	indeks	87	115%	Sangat Tinggi
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhi Pelayan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
5	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Presentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhi Pelayan Administrasi Kepegawaian	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi



		Perangkat Daerah					
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
11	Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75	persen	61,5	82%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar	75	persen	75	100%	Sangat Tinggi
13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	80	Pesen	64,61	80,76%	Tinggi
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan	70	Persen	70	100%	Sangat Tinggi



	Danau serta perencanaan dan pengawasan ASDP	Danau sesuai dengan kebutuhan					
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	75	persen	75	100%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,38	Indeks	0,38	100%	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,38	Indeks	0,38	100%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	70	Persen	70	100%	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	84,44	Persen	86	102%	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,11	Persen	77,5	111%	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	30	Persen	30	100%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	75	Persen	75	100%	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja	50	Persen	50	100%	Sangat Tinggi



		pelayanan yang baik					
24	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	67	Persen	67	100%	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	37,5	Persen	25	67%	Tinggi
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	100	Persen	100	100%	Sangat Tinggi
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	59	Persen	65,62	111%	Sangat Tinggi
29	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100	Persen	80,64	81%	Tinggi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah mencapai target, dengan capaian sangat tinggi sebesar 93,10%, dan capaian tinggi 6,89% dengan rincian sebagai berikut :





1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Rasio Konektivitas dengan target indeks 86,67 dan telah terealisasi 89,99 indeks sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 104%.

Rumus Perhitungan:

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut;
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut)
3. Bobot Trayek atau Lintas:
 - a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;
 - b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8;
 - c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x seminggu), bobot = 0,5.

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota:

Rasio Konektivitas Kabupaten Banjar = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut)

$$\text{Hasil Perhitungan IK1} = \frac{12 \times 1}{12} = 1,00$$

2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut)

$$\text{Hasil Perhitungan IK1} = \frac{2 \times 1}{3} = 0,666$$

Hasil Perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten Banjar

$$(1,00 \times 70) + (0,67 \times 30) = 70 + 19,99 = \underline{89,99}$$

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (0,8999/0,8667) \times 100\%$$

$$= 104\%$$

2) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Nilai IKKI Perangkat Daerah. Nilai IKKI perangkat daerah adalah nilai Indeks Kinerja Kegiatan Instansi yang merupakan hasil penilaian kinerja kegiatan instansi. Target IKKI pada tahun 2024 sebesar 78 dengan realisasi sebesar 87 sehingga



memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 115%.

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu tepat mutu adalah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dibagi dengan jumlah dokumen subbagian perencanaan $\times 100\%$ dengan target tahunan 365 laporan, realisasi 365 laporan, realisasi 100%. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

4) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu adalah dokumen keuangan Dinas Perhubungan yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen subbagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

5) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah adalah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen aset BMD yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen sub bagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

6) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah



Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun dibagi dengan target orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

7) Terselenggaranya kegiatan kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Terselenggaranya kegiatan kantor adalah Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

8) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

9) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi. Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi adalah dokumen umum dan kepegawaian yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

10) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan adalah dokumen umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan yang dihasilkan selama 1 tahun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah barang milik daerah yang terpelihara dibagi dengan barang milik daerah sesuai RKBMD $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

11) Terpenuhi Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi dengan target 75% dan telah terealisasi 61,5% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 82%.

Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	=	(Bobot keterpenuhan terminal x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Perlengkapan jalan x realisasi ketersediaan perlengkapan jalan)				
	=	((0,3 x 0,65) + (0,7 x 0,6)) x 100%				
	=	61,50%				

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= (0,615/0,75) \times 100\% \\ &= 82\%\end{aligned}$$

12) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah dermaga/shelter dikali bobot 20% + kondisi dermaga dikali bobot 20% + perencanaan pembangunan dermaga dikali bobot 20% + pengawasan pembangunan dermaga dikali bobot 20% fasilitas perlengkapan dikali 20% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

13) Terpenuhi Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan



Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 64,61% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 80,76%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan dengan rincian 1.112 dibagi 1.721 dikali 100% dan mendapat capaian sangat tinggi.

14) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD

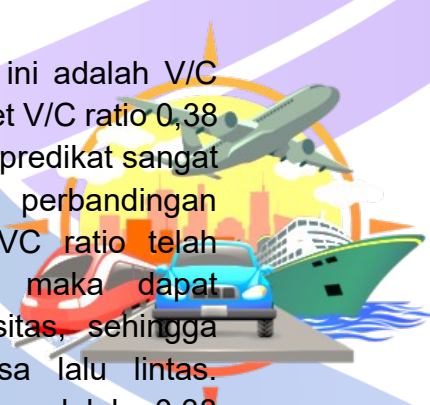
Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 70% dan terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah dermaga/shelter dikali bobot 20% + kondisi dermaga dikali bobot 20% + perencanaan pembangunan dermaga dikali bobot 20% + pengawasan pembangunan dermaga dikali bobot 20% + fasilitas perlengkapan dikali 20% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

15) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 94%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan dengan rincian 1.112 dibagi 1.721 dikali 100% dan mendapat capaian sangat tinggi.

16) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,38 dan telah terealisasi 0,38 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai VC ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sedangkan V/C Ratio Kabupaten Banjar adalah 0,38





(Tingkat Pelayanan) sehingga telah mencapai target tahunan.

17) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,39 dan telah terealisasi 0,39 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai VC ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sedangkan V/C Ratio Kabupaten Banjar adalah 0,38 (Tingkat Pelayanan) sehingga telah mencapai target tahunan.

18) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan andalalin

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin dengan target 75% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi dibagi potensi objek wajib andalalin dikali 100% dengan rincian objek wajib andalalin yang memiliki rekomendasi yaitu 6 dibagi potensi objek wajib andalalin yang berjumlah 8 dikali 100% maka hasilnya menjadi 75%.

19) Meningkatkan Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketaatan Pengguna Jalan target 84,44% dan telah terealisasi 86% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 102%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan kondisi yang diharapkan (100%) dikurangi persentase jumlah pelanggaran dengan rincian perhitungan kondisi yang diharapkan yaitu 100% dikurangi Jumlah Kendaraan yang melanggar dibagi jumlah kendaraan yang dirazia (7 dibagi 50 dikali 100%) menjadi 86,00%

20) Meningkatkan Sarana Transportasi Jalan yang Layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah presentase kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (sarana). Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan keterpenuhan sarana transportasi yaitu angkutan umum dengan kondisi tertib administrasi dan laik jalan, dengan Bobot Angkutan Umum (30%), Bobot PKB



(70%). Target sasaran ini yaitu 70,11% dan telah terealisasi 77,5% memperoleh predikat capaian tinggi 111%.

21) Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan dan kelaikan kapal di bagi jumlah angkutan sungai dan danau yang ada dikali 100%. Target sasaran ini adalah 30% dan telah terealisasi 30% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.

22) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah dermaga/shelter dikali bobot 20% + kondisi dermaga dikali bobot 20% + perencanaan pembangunan dermaga dikali bobot 20% + pengawasan pembangunan dermaga dikali bobot 20% + fasilitas perlengkapan dikali 20% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

23) Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 50% dan telah terealisasi 50% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.

24) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 67% dan terealisasi 67% sehingga memperoleh predikat





sangat tinggi dengan nilai 100%. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah dermaga/shelter dikali bobot 20% + kondisi dermaga dikali bobot 20% + perencanaan dikali bobot 20% + pengawasan dikali bobot 20% + fasilitas perlengkapan dikali 20% sehingga mendapat capaian sangat tinggi.

25) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Angkutan Umum dengan Tingkat Kinerja Pelayanan yang Baik. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 37,5% dan telah terealisasi 25% sehingga memperoleh capaian predikat rendah dengan nilai 67%.

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah dokumen yang direalisasikan dibagi dengan dokumen yang direncanakan. Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang berisi tentang penetapan tarif angkutan umum. Dokumen ini dibuat dengan dasar dari kajian usulan penetapan tarif sesuai dengan kondisi di lapangan. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh capaian predikat sangat tinggi dengan nilai 100%.

27) Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Kendaraan Wajib Uji yang memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah Kendaraan yang lulus uji per tahun/jumlah kendaraan yang diuji dibagi 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat capaian sedang dengan nilai 70%.

28) Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersedianya fasilitas penyenggaraan terminal tipe C sesuai standar. Realisasi Indikator ini berasal dari





perhitungan jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia dibagi jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 59% dan telah terealisasi 65,62% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 111%.

29) Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Titik Parkir Berizin yang dikelola. Realisasi Indikator ini berasal dari perhitungan jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%. Target sasaran ini yaitu 100% dan telah terealisasi 80,64% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 81%.

A.3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis (SKPD) sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Rasio	90	124,13%	84,17	93,52%	56,67	90,70%	
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Dinas Perhubungan	Indeks	87,08	114,57%	74,50	102,05%	68,15	92,09	
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	

		mutu								
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	% Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	

9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	
11	Terpenuhiya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Persen	61,5	100,00%	57,81	67,22%	56,5	89,76	
12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persen	80	100,00%	68	77,27%	63	140	
13	Terpenuhiya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persen	75	94,00%	57	63%	54	77,14	

14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	67	100,00%	68	88,31%	63	98,43	
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persen	75	100,00%	57	63%	54	77,14	
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,38	100,00%	0,39	108%	0,4	100	
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,38	100,00%	0,39	108%	0,4	100	
18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	75	100,00%	70	82,35%	60	92,3	
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	86	100,51%	84,34	96,08%	83,78	100	

20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Persen	70,15	100,00%	59,8	85,16%	77,5	110,58	
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Persen	50	100,00%	22,12	24,58%	n/a	n/a	
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persen	80	100,00%	68	77,27%	63	140	
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	70	100,00%	66,66	74,07%	100	333%	

24	Menigkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	67	100,00%	68	88,31%	63	98,43	
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	50	100,00%	36,36	48,48%	25	100	
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen	100	100,00%	100	100%	56,5	89,76	
27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persen	100	100,00%	70	70%	100	100	
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Persen	65,63	104,17%	59,37	79%	62,5	113,63	

29	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen	99,8	99,80%	117,65	117,65%	117,65	117,65	
----	---	---	--------	------	--------	--------	---------	--------	--------	--



A.4 REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TARGET KINERJA SASARAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2024, untuk mengetahui kemampuan (*SKPD*) selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target akhir Renstra di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Rasio	89,99	100	111,12
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	indeks	87	80	91,87



3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100	100,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100,00
5	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Presentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.	Persen	100	100	100,00
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	100	100,00
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100,00



10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00
11	Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	persen	61,5	86	139,84
12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar	persen	75	88	117,33
13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Pesen	75	90	120,00
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASDP	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	70	77	110,00
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	persen	75	90	120,00
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,39	0,36	92,31
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,39	0,36	92,31
18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	70	85	121,43



19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	86	87,78	102,07
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Persen	77,5	70,23	90,62
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Persen	30	80	266,67
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persen	75	88	117,33
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	50	90	180,00
24	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	67	77	114,93
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	25	75	300,00



26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen	100	100	100,00
27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persen	100	100	100,00
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Persen	65,62	75	114,29
29	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen	99,8	100	100,20





A.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan standar provinsi dan nasional bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar lebih baik/kurang baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Rasio	89,99	n/a	n/a
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	indeks	87	n/a	n/a
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	n/a	n/a
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	n/a	n/a
5	Pelaksanaan	Presentase	Persen	100	n/a	n/a



	pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.				
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	n/a	n/a
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	n/a	n/a
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	n/a	n/a
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	n/a	n/a
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	n/a	n/a
11	Terpenuhi Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	persen	61,5	n/a	n/a
12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar	persen	75	n/a	n/a



13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Pesen	75	n/a	n/a
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASDP	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	70	n/a	n/a
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	persen	75	n/a	n/a
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,39	n/a	n/a
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0,39	n/a	n/a
18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	70	n/a	n/a
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	86	n/a	n/a
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Persen	77,5	n/a	n/a
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Persen	30	n/a	n/a
22	Meningkatnya prasarana transportasi	Meningkatnya prasarana transportasi	Persen	75	n/a	n/a



	sungai dan danau yang layak	sungai dan danau yang layak				
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	50	n/a	n/a
24	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	67	n/a	n/a
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	25	n/a	n/a
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen	100	n/a	n/a
27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persen	100	n/a	n/a
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Persen	65,62	n/a	n/a
29	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen	99,8	n/a	n/a

Realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor perhubungan di daerah tersebut.



Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta bagaimana pencapaian tersebut dapat disandingkan dengan standar kinerja yang berlaku di tingkat provinsi maupun nasional.

Namun, dalam analisis ini, kami tidak dapat melakukan perbandingan secara langsung dengan standar provinsi dan nasional, karena data terkait kinerja Dinas Perhubungan di tingkat provinsi dan nasional tidak tersedia atau tidak dapat diakses pada saat penyusunan laporan ini. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai posisi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam konteks yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Meskipun demikian, berdasarkan realisasi kinerja yang tercatat di Kabupaten Banjar, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah berusaha maksimal dalam mencapai target yang ada, dengan fokus pada peningkatan layanan transportasi, infrastruktur, dan keselamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Ke depan, sangat diharapkan adanya penyediaan data yang lebih lengkap baik dari tingkat provinsi maupun nasional, agar perbandingan yang lebih akurat dan objektif dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebanding dengan standar yang ada di tingkat provinsi dan nasional.

A.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Rasio Konektivitas dengan target indeks 86,67 dan telah terealisasi





89,99 indeks. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja di internal Dinas Perhubungan, adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing pengampu kinerja untuk bersama-sama mencapai target kinerja Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pencapaian target kinerja, fasilitas penunjang kerja yang memadai, dukungan dan komitmen instansi dan stakeholder terkait. Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai target capaian ini adalah luasnya cakupan wilayah kabupaten Banjar yang harus di ampu oleh dinas perhubungan kabupaten Banjar, kurangnya sumber daya manusia dan juga terbatasnya anggaran.

2) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Nilai IKKI Perangkat Daerah. Nilai IKKI perangkat daerah adalah nilai Indeks Kinerja Kegiatan Instansi yang merupakan hasil penilaian kinerja kegiatan instansi. Target IKKI pada tahun 2024 sebesar 76 dengan realisasi sebesar 87. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja di internal Dinas Perhubungan sehingga dapat menyediakan poin-poin yang disyaratkan untuk mencapai capaian yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah karena mekanisme pemenuhan data dukung dan penilaian berubah, inovasi pelayanan yang masih belum berjalan sehingga tidak dapat melampirkan laporan hasil implementasi dan laporan evaluasi atas inovasi.

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dibagi dengan jumlah dokumen subbagian perencanaan $\times 100 \%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena



pemenuhan dokumen yang dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tersedianya data dukung dalam pemenuhan laporan, koordinasi yang terjalin baik antar unit kerja di internal Dinas Perhubungan, sehingga memudahkan pengumpulan data perencanaan serta berkonsultasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan dokumen dan laporan. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah perlunya penyesuaian dengan format penyusunan perencanaan yang baru dan menyesuaikan standart biaya terkait penyusunan RKA.

4) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen subbagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena ketersediaan dana, data keuangan yang diarsipkan dengan baik, laporan yang terselesaikan, dan SDM yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah Sistem SIPD kadang error dan tidak bisa dibuka, penyesuaian pendapatan terkait dengan struktur PNS seperti kenaikan gaji kenaikan pangkat atau berkala yang memerlukan data yang valid dari bagian yang bersangkutan, Adanya apk baru silangkar yang dalam pengerjaannya double Adanya pemisihan Gaji ASN dan PPPK.

5) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen aset BMD yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen sub bagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena adanya partisipasi dan dukungan internal kantor dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan BMD, data dukung yang lengkap sehingga penyusunan laporan



dapat berjalan dengan lancar, SDM yang kompeten, dan koordinasi yang berjalan baik antar instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah kurangnya koordinasi pengurus barang dengan pembuat usulan anggaran kebutuhan Barang yang Berubah ubah dan juga penyesuaian Standar Harga barang terbaru.

6) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun dibagi dengan target orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini karena adanya dukungan anggaran yang tersedia untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), adanya penawaran Bimtek dari pihak terkait, dan adanya bimtek yang diadakan secara gratis untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah belum banyak tersedia undangan bimbingan teknis kendala jadwal bimbingan teknis dan juga anggaran dan target yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai Dinas Perhubungan.

7) Terselenggaranya kegiatan kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong adalah tersedianya anggaran dalam mencari bahan/barang yang diinginkan, ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan dan juga komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antara semua pihak yang terlibat. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah terkendalanya perumusan kebutuhan barang logistik.



8) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah alokasi anggaran yang cukup dan penggunaan yang tepat waktu dan juga Kebijakan dan regulasi yang mendukung pengadaan yang efisien dan efektif. Faktor penghambat nya yaitu proses pengadaan yang melibatkan banyak tahapan dan persetujuan dari berbagai pihak sering kali memperlambat pelaksanaan dan juga terbatasnya jumlah penyedia barang yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

9) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah penggunaan sistem pembayaran elektronik atau otomatis dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran tagihan dan juga tersedianya anggaran. Faktor penghambat nya yaitu jika anggaran tidak dicairkan tepat waktu, pembayaran untuk tagihan listrik dan air bisa tertunda dan juga gangguan teknis dalam sistem pembayaran elektronik atau masalah dengan akses internet dapat menghambat proses pembayaran

10) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya





anggaran dan ketersediaan stok barang/sparepart yang diinginkan. Faktor penghambat nya yaitu sulitnya mencari bengkel yang sesuai keinginan dan juga jarak bengkel yang sesuai terlalu jauh.

11) Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi dengan target 75% dan telah terealisasi 61,5% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 82%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran dan sumber daya manusia dinas perhubungan dalam memenuhi Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Banjar. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah usulan kebutuhan prasarana dari masyarakat yang belum dilengkapi data dukung dan juga data base jaringan jalan dan kinerja jaringan jalan yang belum di miliki secara menyeluruh dan juga fasilitas terminal yang sering hilang dicuri. masih seringnya fasilitas terminal yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

12) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tenaga teknis yang telah memiliki kompetensi dapat membuat perencanaan dan kegiatan sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga adanya kegiatan survey dan monitoring evaluasi angkutan sungai dan danau dalam rangka kegiatan selanjutnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam Angkutan Sungai dan Danau. Anggaran minim dalam kegiatan survey angkutan sungai dan danau serta belanja bidang dan seksi. Dan juga izin kelaikan kapal yang bukan tupoksi dishub melainkan tupoksi kementerian perhubungan melalui BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.

13) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan





Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 94%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan untuk dapat membangun perlengkapan jalan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang lengkapnya peta kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh wilayah kabupaten Banjar.

14) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasaan ASD

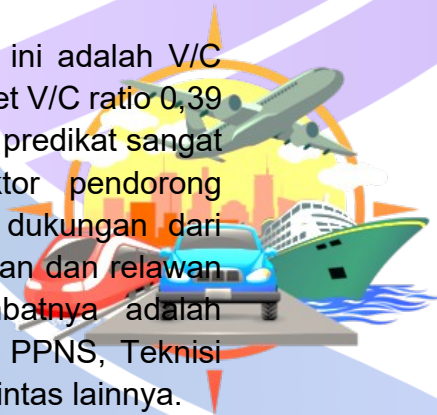
Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 70% dan terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya kajian yang dapat mendukung pembangunan dermaga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya peralatan survey untuk pemetaan ataupun di lapangan yang belum tersedia seperti Drone, Counter, Speed Gun, Walking Measure dan lainnya.

15) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 94%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk dapat membangun perlengkapan jalan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang lengkapnya peta kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh wilayah kabupaten Banjar.

16) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,39 dan telah terealisasi 0,39 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya dukungan dari pihak instansi terkait seperti seperti kepolisian dan relawan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi PPNS, Teknisi APILL serta kompetensi pada Bidang Lalu Lintas lainnya.





17) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,39 dan telah terealisasi 0,39 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya dukungan dari pihak instansi terkait seperti kepolisian dan relawan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi PPNS, Teknisi APILL serta kompetensi pada Bidang Lalu Lintas lainnya dan juga angka kecelakaan lalu lintas terus semakin meningkat karena kurang atau lemahnya pengawasan dan penindakan pada pelanggaran lalu lintas.

18) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin dengan target 70% dan telah terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya dukungan tentang ada peraturan andalalin melalui proses OSS (Online Single Submission) sehingga dishub sebagai verifikator dokumen yang diajukan pemohon melalui OSS dari Kementerian BKPM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah database andalalin yang minim, menyulitkan dalam berinovasi dan penentuan kebijakan untuk kemajuan penataan wilayah.

19) Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketaatan Pengguna Jalan target 84,44% dan telah terealisasi 86% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 102%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya anggaran untuk pengadaan faskes, water barrier, traffic cone, pick up, mobil patwal dan kendaraan roda 2 untuk patroli. Sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas (misalnya: tata cara berkendara, memahami arti rambu, alat keselamatan, dll).

20) Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah presentase kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (sarana) dengan target 70,11% dan telah



teralisasi 77,5% memperoleh predikat capaian tinggi 111%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya angkutan feeder gratis untuk masyarakat sebagai pengumpan ke Bus BTS. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterlambatan internal supir feeder dalam pembuatan koperasi antar supir untuk penunjukan supir feeder. Faktor lain yaitu keterlambatan resminya SK angkutan feeder.

21) Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak

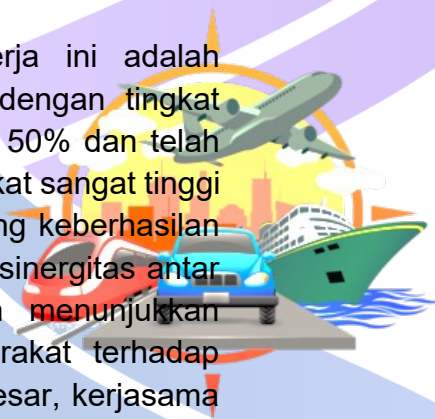
Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal dengan target 30% dan telah terealisasi 30% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah SDM berkualitas dalam mendukung tercapainya sarana ini. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya SK trayek Angkutan sungai dan danau dari bagian hukum Setda Kab. Banjar

22) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran dalam melakukan survey dan monitoring transportasi sungai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya partisipasi pengusaha angkutan umum dan juga banyaknya kendaraan air yang tidak memenuhi syarat laik jalan.

23) Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik dengan target 50% dan telah terealisasi 50% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antar instansi, meskipun belum optimal sudah menunjukkan antusias yang baik, antusias dari masyarakat terhadap pelatihan dan sosialisasi bencana sangat besar, kerjasama





dengan stakeholder dalam penyusunan dokumen cukup optimal sehingga dapat mendukung efektivitas penyelesaian. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah pemegang kewenangan wilayah sungai dan danau masih tercampur aduk antara Dinas Perhubungan kabupaten banjar dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

24) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 67% dan terealisasi 67% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya kajian yang dapat mendukung pembangunan dermaga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya peralatan survey untuk pemetaan ataupun di lapangan yang belum tersedia seperti Drone, Counter, Speed Gun, Walking Measure dan lainnya.

25) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Angkutan Umum dengan Tingkat Kinerja Pelayanan yang Baik dengan target 37,5% dan telah terealisasi 25% sehingga memperoleh capaian predikat rendah dengan nilai 67%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya dukungan dari pemerintah daerah maupun atasan langsung dalam pengadaan transportasi angkutan feeder yang akan memberi dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah karena keterlambatan pembentukan badan hukum (Koperasi angkutan), keterlambatan pengesahan Perbup dan SK sebagai dasar hukum pelaksanaan angkutan feeder, dan keterlambatan operator (pengusaha angkutan feeder) dalam pengoperasian feeder sehingga yang awalnya direncanakan selama 3 bulan menjadi hanya 15 hari.

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum dengan target 100% dan telah terealisasi



100% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran dalam melakukan kajian penetapan tarif untuk hasil yang lebih berkualitas. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah masih banyaknya pelaku usaha angkutan yang tidak menggunakan tarif yang sudah ditetapkan.

27) Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Kendaraan Wajib Uji yang memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan dengan target 100% dan telah terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat capaian sedang dengan nilai 70%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk kalibrasi mesin uji dan juga respon cepat terhadap server dari jaringan yang bermasalah. Sedangkan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk indikator ini adalah masih seringnya mesin yang digunakan untuk uji kler mengalami kerusakan sehingga dapat mempengaruhi pengujian.

28) Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersedianya fasilitas penyenggaraan terminal tipe C sesuai standar dengan target 59% dan telah terealisasi 65,62% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 111%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya peningkatan pemantauan dan pembinaan parkir diwilayah Kabupaten Banjar. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kantor UPT tidak bertempat di terminal sehingga pengawasan areal terminal kurang maksimal.

29) Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Titik Parkir Berizin yang dikelola dengan target 100% dan telah terealisasi 80,64% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 81%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya anggaran untuk monitoring parkir liar. Sedangkan faktor penghambatnya



adalah masih banyaknya parkir liar di wilayah Kabupaten Banjar.

A.7 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

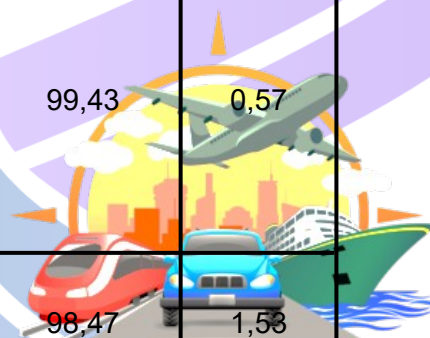
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari 3 sasaran, menunjukkan pencapaian 3 sasaran hampir mencapai 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	124,13%	90,90	9,1
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	114,57%	88,20	11,80
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	99,32	0,68

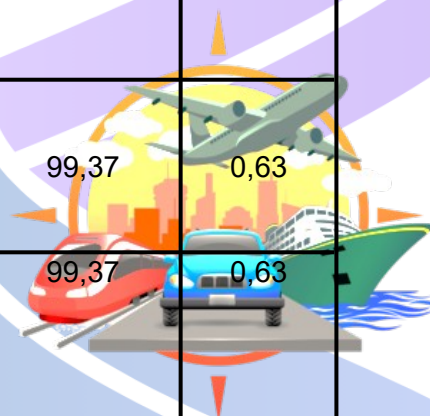


		tepat waktu dan tepat mutu			
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	81,38	18,62
5	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Presentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.	100,00%	100,00	0,00
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	99,77	0,23
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	98,09	1,91
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100,00%	98,72	1,28
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100,00%	92,31	7,69
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	99,43	0,57
11	Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	100,00%	98,47	1,53





12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar	100,00%	99,37	0,63
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASDP	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	100,00%	99,37	0,63
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	100,00%	98,56	1,44
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	100,00%	99,41	0,59
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	100,00%	99,47	0,53
18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	100,00%	98,08	1,92
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	100,51%	98,92	1,08
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	100,00%	76,68	23,32
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	100,00%	99,37	0,63
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	100,00%	99,37	0,63
23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang	100,00%	99,37	0,63





		baik			
24	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	100,00%	99,37	0,63
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	100,00%	26,32	73,68
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	100,00%	99,37	0,63
27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	100,00%	98,37	1,63
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	104,17%	96,94	3,06

A.8 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan telah tercapai dan juga Belum Tercapai, tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan merupakan hasil yang selalu ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dengan segala Kendala dan Resikonya.



Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Rasio Konektivitas dengan target indeks 86,67 dan telah terealisasi 89,99 indeks. Adapun program yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Pelayaran. Data yang tersedia di Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Sehingga dari data diatas, nilai Rasio Konektivitas Dinas Perhitungan Kabupaten Banjar mendapat nilai 89,99.

2) Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Nilai IKKI Perangkat Daerah. Nilai IKKI perangkat daerah adalah nilai Indeks Kinerja Kegiatan Instansi yang merupakan hasil penilaian kinerja kegiatan instansi. Target IKKI pada tahun 2024 sebesar 76 dengan realisasi sebesar 87. Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) dengan target pada tahun 2024 sebesar 85 dan realisasi sebesar 82,96 yang menunjukkan kegagalan indikator yang tercapai. Adapun program yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu



perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKASKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu mempersiapkan data pendukung untuk pemenuhan syarat dokumen yang diminta oleh inspektorat untuk penilaian pada semester II karena pada semester I hanya dilakukan penilaian mandiri, melakukan pengumpulan data dukung, penilaian mandiri, pembuatan laporan penilaian mandiri, revidi dari inspektorat, pengumpulan data dukung dan penilaian mandiri atas hasil perbaikan setelah evaluasi inspektorat, dan penetapan nilai hasil akhir dari inspektorat. Kegagalan pencapaian target kinerja IKKI disebabkan karena mekanisme pemenuhan data dukung dan penilaian berubah, inovasi pelayanan yang masih belum berjalan sehingga tidak dapat melampirkan laporan hasil implementasi dan laporan evaluasi atas inovasi.

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas



Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dibagi dengan jumlah dokumen subbagian perencanaan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu telah melakukan penginputan Renja 2025 pada aplikasi SIPD, telah melakukan penyusunan dokumen Renja 2025 (penyempurnaan ranwal Renja 2025), telah selesai mengikuti desk terakhir penyusunan Renja 2025, telah melakukan beberapa penyesuaian pada dokumen rancangan akhir Renja 2025, telah menyusun dokumen Renja 2025 pada tahap penyelesaian Ranhir Renja 2025 yang diinput pada SIPD DINAS PERHUBUNGAN, telah melakukan penyusunan Renja Perubahan 2024, telah mengikuti desk evaluasi renja 2025 dan Renja perubahan 2024 oleh Bappedalitbang, telah melaksanakan finalisasi Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024, pencetakan dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penyusunan RKA, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penginputan RKA pada aplikasi SIPD RI sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk anggaran DINAS PERHUBUNGAN, pencetakan dokumen RKA 2025, perbaikan RKA berdasarkan rewiu APIP, perbaikan target pada kepala RKA, penginputan penambahan pagu anggaran berupa sosialisasi peraturan perundang undangan yang didapat setelah rapat paripurna DPRD, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun



sekretariat untuk usulan RKA perubahan RKA-SKPD manual, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penginputan RKA perubahan pada aplikasi SIPD RI sesuai dengan pagu yang ditetapkan untuk penambahan anggaran DINAS PERHUBUNGAN, pencetakan dokumen RKA Perubahan 2024, telah melakukan koordinasi persiapan penyusunan dokumen DPA DINAS PERHUBUNGAN 2024, pelaksanaan penyusunan DPA Dinas Perhubungan 2024 telah selesai dilaksanakan beserta dengan pengesahannya, dokumen DPA telah dicetak dan dipublikasikan kepada BPKPAD maupun bagian/bidang intern DINAS PERHUBUNGAN, telah melakukan koordinasi penyusunan dokumen DPA Pergeseran 1 dan DPA Pergeseran 2 Tahun 2024, pelaksanaan penyusunan DPA Pergeseran 1 dan DPA Pergeseran 2 2024 telah selesai dilaksanakan beserta dengan pengesahannya, telah melakukan pembelian ATK untuk penyusunan DPA Pergeseran 1 dan DPA Pergeseran 2 2024, telah melakukan koordinasi penyusunan dokumen DPA Perubahan 2024, pencetakan, penandatanganan, dan penggandaan dokumen DPA Perubahan 2024 telah selesai, telah mempersiapkan bahan data capaian realisasi kinerja, telah mengikuti rapat pembahasan hasil realisasi kinerja, telah mengikuti asistensi dengan tim penyusunan laporan hasil kinerja daerah, telah mengikuti asistensi penyusunan laporan bupati, pencetakan dan penggandaan dokumen, koordinasi antar sub bagian perencanaan terkait persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan penyusunan laporan evaluasi rutin bulanan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan operator bidang internal di Dinas Perhubungan terkait pelaporan rutin bulanan dan triwulanan, telah melakukan pembuatan laporan triwulan I, telah melaksanakan rapat internal Dinas Perhubungan terkait evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan I, mengarsipkan dokumen-dokumen evaluasi kinerja, penyerahan dokumen evaluasi kepada pihak terkait, mengikuti kegiatan rapat asistensi pengisian simondalev, telah melakukan pembuatan laporan triwulan II, telah melaksanakan desk evaluasi kinerja triwulan II, telah mengikuti sosialisasi pemanfaatan modul e-validasi pada aplikasi simondalev dan sosialisasi Perbup No. 13 Tahun 2024, telah mengikuti rapat



monitoring dan evaluasi pembangunan daerah triwulan II, telah melakukan pembuatan laporan triwulan III, telah melaksanakan desk evaluasi triwulan III, telah melaksanakan rapat internal Dinas Perhubungan terkait evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan III, telah mengikuti desk evaluasi triwulan IV, dan melakukan penyusunan laporan LKJIP Tahun 2024

4) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen subbagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu persiapan pelaksanaan atas pembayaran gaji ASN dan TPP ASN DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar (pembuatan template, daftar gaji, daftar tambahan penghasilan PNS dan PPPK), pelaksanaan atas pembayaran gaji berupa input data sim gaji, payroll one step gaji, aplikasi SIPD penatausahaan, dan tambahan penghasilan pegawai, kepengurusan berkas yang sudah bertanda tangan lengkap diserahkan ke BPKPAD untuk gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai untuk proses selanjutnya, pembayaran honorarium bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD), petugas pembantu, pengurus barang dan pejabat pengadaan, telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun berupa neraca, LRA dan kalk tahun anggaran 2023, telah cetak dokumen laporan keuangan anaudit dan audited TA. 2023, untuk laporan keuangan TA. 2024 baru tahap penginputan saldo awal 2024 dan jurnal balik untuk neraca, LO dan LPE, persiapan penginputan data



SPJ keuangan berupa bukti LS, GU dan pajak pada aplikasi keuangan yang diterapkan yaitu SIPD RI dan SIPD langkar, melakukan pembayaran atas SPJ yang sudah lengkap pada aplikasi IBB Bank Kalsel, menghimpun pelaporan keuangan bulanan pada aplikasi SIPD langkar, dan membuat rekonsiliasi pajak yang telah dibayarkan.

5) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen aset BMD yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen sub bagian keuangan $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD, dan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu persiapan rapat pembuatan dokumen perencanaan kebutuhan BMD 2025, telah melakukan koordinasi dan telaah RKBMD pada tim pendamping SKPD, telah tersusun perencanaan kebutuhan BMD DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar, rekonsiliasi BMD TA 2024, pembuatan laporan inventaris, pembuatan KIR, dan melaksanakan pembuatan laporan penatausahaan barang pakai habis.

6) Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun dibagi dengan target orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan selama 1 tahun $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu



pendataan ASN yang akan mengikuti Bimtek, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, mengadministrasikan semua penawaran penyelenggaraan Bimtek yang masuk, melengkapi administrasi yang diperlukan untuk mengikuti Bimtek, dan melaksanakan Bimtek/pengembangan kompetensi.

7) Terselenggaranya kegiatan kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran $\times 100\%$. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitas kunjungan tamu, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu membuat KAK peralatan dan perlengkapan kantor berupa penyediaan barang/jasa, penyediaan bahan logistik kantor berupa barang pakai habis, penyediaan bahan cetak dan penggandaan, dan pemesanan makan dan minum jamuan tamu, memfasilitasi tamu yang datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, pengajuan permohonan kepada PP dan PPK, melakukan proses melalui e-katalog melalui PPK atau PP, negosiasi dengan penyedia, pembuatan surat pesanan, pengiriman barang/jasa, pembuatan BA serah terima, pembayaran, membuat surat tugas untuk melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik dalam maupun luar daerah, melakukan perjalanan dinas, dan membuat laporan setelah melakukan perjalanan dinas.

8) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%.



Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pengadaan mebel. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu pembuatan KAK dan spesifikasi barang, pengajuan permohonan kepada PP dan PPK, melakukan proses melalui e-katalog melalui PPK atau PP, negosiasi dengan penyedia, pembuatan surat pesanan, pengiriman barang/jasa, pembuatan BA serah terima, dan pembayaran.

9) Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan pembayaran tagihan telepon dan listrik, membuat telaahan staf, membuat daftar gaji, dan membuat nota pencairan dana.

10) Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator ini diperoleh dari perhitungan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan,



pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu membuat telaahan staf untuk kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang akan dipelihara, membuat telaahan staf semua peralatan dan mesin yang akan dipelihara, membuat KAK kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, membuat nota pencairan dana, dan melakukan kegiatan perbaikan/pemeliharaan peralatan yang rusak.

11) Terpenuhiya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi dengan target 75% dan telah terealisasi 61,5% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 82%. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah usulan kebutuhan prasarana dari masyarakat yang belum dilengkapi data dukung dan juga data base jaringan jalan dan kinerja jaringan jalan yang belum di miliki secara menyeluruh. Fasilitas terminal yang sering hilang dicuri. Faktor penghambat nya yaitu masih seringnya fasilitas terminal yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

12) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Selain itu, tahapan aktivitas



yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian pembangunan untuk efektivitas pembangunan dermaga. Dinas perhubungan telah membangun 6 dermaga di wilayah kabupaten banjar. Setelah melakukan pembangunan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemeliharaan dermaga yang dibutuhkan.

13) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 94%. Adapun subkegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan survey dan monitoring kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh wilayah kab. Banjar. Dinas Perhubungan juga telah membangun dan memelihara perlengkapan jalan yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

14) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 70% dan terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Selain itu,



tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian pembangunan untuk efektivitas pembangunan dermaga. Dinas perhubungan telah membangun 6 dermaga di wilayah kabupaten banjar. Setelah melakukan pembangunan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemeliharaan dermaga yang dibutuhkan.

15) Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpenuhi dengan target 80% dan telah terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sedang dengan nilai 94%. Adapun subkegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan survey dan monitoring kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh wilayah kab. Banjar. Dinas Perhubungan juga telah membangun dan memelihara perlengkapan jalan yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

16) Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,39 dan telah terealisasi 0,39 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan PAM jalur ketika ada acara besar atau keagamaan untuk membantu menertibkan kelancaran berlalu lintas, melakukan monitoring andalalin yang memenuhi persyaratan teknis dan juga



melakukan manajemen rekayasa di wilayah kabupaten banjar.

17) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah V/C Ratio Jalan di Jalan Kabupaten dengan target V/C ratio 0,39 dan telah terealisasi 0,39 rasio memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan PAM jalur ketika ada acara besar atau keagamaan untuk membantu menertibkan kelancaran berlalu lintas, melakukan monitoring andalalin yang memenuhi persyaratan teknis dan juga melakukan manajemen rekayasa di wilayah kabupaten banjar.

18) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan andalalin

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin dengan target 70% dan telah terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan survei lalu lintas, pemetaan jalur transportasi, dan pengamatan kondisi infrastruktur transportasi yang ada, Mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan atau potensi masalah lalu lintas dan juga menyusun rekomendasi terkait perbaikan sistem lalu lintas untuk mengatasi masalah yang ditemukan.

19) Meningkatkan Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Ketaatan Pengguna Jalan target 84,44% dan telah terealisasi 86% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 102%. Adapun aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan PAM jalur secara teratur untuk waktu pagi dan sore. PAM jalur juga diadakan ketika ada kegiatan acara besar maupun keagamaan.



20) Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah presentase kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (sarana) dengan target 70,11% dan telah terealisasi 77,5% memperoleh predikat capaian tinggi 111%. Adapun aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu mengadakan dan mengkoordinasikan angkutan feeder gratis untuk masyarakat sebagai pengumpan ke Bus BTS, Mensosialisasi peningkatan ketertiban pemenuhan standar pelayanan minimal dan juga melaksanakan Survei Monitoring Kinerja Angkutan Jalan di Astambul, Mataraman dan Simpang Empat.

21) Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal dengan target 30% dan telah terealisasi 30% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian dokumen Detail Engineering Design (DED) dan melakukan sosialisasi mengenai kelaikan awak kapal dalam hal keselamatan dan melakukan penerbitan PAS kapal.

22) Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak dengan target 75% dan terealisasi 75% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Selain itu, tahapan aktivitas



yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian pembangunan untuk efektivitas pembangunan dermaga. Dinas perhubungan telah membangun 6 dermaga di wilayah kabupaten banjar. Setelah melakukan pembangunan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemeliharaan dermaga yang dibutuhkan.

23) Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik dengan target 50% dan telah terealisasi 50% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun subkegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu mensosialisasikan tata tertib keselamatan untuk awak kapal di angkutan sungai dan penerbitan PAS kapal dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

24) Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan dengan target 67% dan terealisasi 67% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu Pengoperasian dan



Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian pembangunan untuk efektivitas pembangunan dermaga. Dinas perhubungan telah membangun 6 dermaga di wilayah kabupaten banjar. Setelah melakukan pembangunan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemeliharaan dermaga yang dibutuhkan.

25) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Angkutan Umum dengan Tingkat Kinerja Pelayanan yang Baik dengan target 37,5% dan telah terealisasi 25% sehingga memperoleh capaian predikat rendah dengan nilai 67 Adapun subkegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu mensosialisasikan tata tertib keselamatan untuk awak kapal di angkutan sungai dan penerbitan PAS kapal dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

26) Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum dengan target 100% dan telah terealisasi 100% sehingga memperoleh capaian predikat sangat tinggi dengan nilai 100%. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan





Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan kajian tarif angkutan, melakukan skema tarif angkutan dan juga menetapkan tarif melalui SK Bupati.

27) Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Presentase Kendaraan Wajib Uji yang memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan dengan target 100% dan telah terealisasi 70% sehingga memperoleh predikat capaian sedang dengan nilai 70%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan uji kir kepada angkutan barang dan angkutan umum, menerbitkan rekomendasi numpang uji dan mutasi uji.

28) Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Tersedianya fasilitas penyenggaraan terminal tipe C sesuai standar dengan target 59% dan telah terealisasi 65,62% sehingga memperoleh predikat sangat tinggi dengan nilai 111%. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang). Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu menghirung kedatangan kedatangan dan keberangkatan angkuta dan pelayanan operasional terminal.

29) Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Titik Parkir Berizin yang dikelola dengan target 100% dan telah terealisasi 80,64% sehingga memperoleh predikat tinggi dengan nilai 81%. Adapun sub kegiatan yang





dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu melakukan monitoring titik-titik parkir, melakukan sosialisasi aturan parkir dan juga mencari titik-titik potensi parkir dan juga melakukan penegakan hukum parkir liar dengan instansi POLRI.

A.9 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

A.9.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2024

a. Penilaian Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah terhadap Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 78,22 atau predikat **“BB”** dapat diartikan bahwa akuntabilitas **Sangat Baik**, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI ANGKA
a	Perencanaan Kinerja	30	24.22
b	Pengukuran Kinerja	30	22.20
c	Pelaporan Kinerja	15	11.30
d	Evaluasi Internal	25	20.50
NILAI			78.22
PREDIKAT			BB
SEBUTAN			SANGAT BAIK



Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenpan RB pada Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023, telah terjadi perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level perangkat daerah.

b. Uraian Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

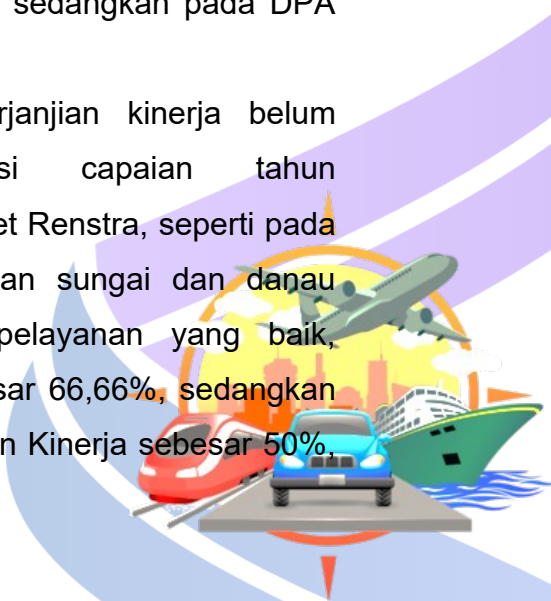
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 24,22 dari nilai maksimal 30,00. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Indikator merupakan alat ukur/parameter untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan/dicapai, namun masih terdapat kelemahannya, yaitu :





1. Indikator kinerja perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen penganggaran (DPA), seperti pada indikator kinerja Kabid Sarana Prasarana Perhubungan dengan Indikator "Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak.
 2. Penetapan indikator yang belum tepat seperti pada perjanjian kinerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kinerja yaitu Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak dengan indikator yaitu Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak.
- b) Penetapan target belum memadai, yaitu:
1. Penetapan target di perjanjian kinerja belum memperhatikan target di dokumen penganggaran (DPA), seperti pada Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan Darat dengan indikator Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal dengan target 30%, sedangkan pada DPA sebesar 50%;
 2. Penetapan target di perjanjian kinerja belum memperhatikan realisasi capaian tahun sebelumnya dan/atau target Renstra, seperti pada target Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik, capaian tahun 2023 sebesar 66,66%, sedangkan target 2023 pada Perjanjian Kinerja sebesar 50%, Restra sebesar 70%.





- c) Dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja telah disusun namun masih terdapat kelemahan yaitu belum memuat kinerja/sasaran dari program sampai dengan level sub kegiatan.
- d) Masih terdapat ketidaksesuaian penanggungjawab antara Renstra dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti indikator kinerja pada Renstra yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar dengan penanggungjawab Kabid Angkutan Perhubungan Darat, sedangkan pada SK IKU menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan Darat.
- e) Indikator beserta target pada Renstra belum tertuang pada perjanjian kinerja, seperti Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar.
- f) Hasil penyusunan penjenjangan kinerja belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 22,20 dari nilai maksimal 30,00. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyepakati perjanjian kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal dan menyusun laporan kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan belum sepenuhnya menjadi pedoman saat melakukan





pembagian kinerja pada perjanjian kinerja, seperti kinerja Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD, pada SK IKU menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, sedangkan pada perjanjian kinerja menjadi tanggung jawab Kepala seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.

- b) Masih terdapat kinerja yang diampu lebih dari satu orang, seperti pada kinerja "Terpenuhinya perengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan*, yang diampu oleh Kepala seksi jaringan dan fasilitas perhubungan darat dan Kepala seksi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, atau kinerja "Meningkatnya kelancaran lalu lintas" yang diampu oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat dan Kepala seksi manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
- c) Pimpinan belum terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja secara berkala.
- d) Laporan triwulan Dinas Perhubungan telah dibuat namun belum terdapat pengukuran secara berjenjang yang dituangkan dalam laporan kinerja per individu dengan memuat kesepakatan rekomendasi dan tindak lanjut antara pemberi dan penerima amanah, sebagai upaya mempermudah dalam melakukan pemantauan/ tindak lanjut di triwulan selanjutnya untuk mencapai target organisasi diakhir tahun.
- e) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja, dan menjadi dasar dalam pemberian reward/punishment.





3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai 11,30 dari nilai maksimal 15,00. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) namun masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a) Realisasi Kinerja untuk Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 telah diperbandingkan dengan target jangka menengah, serta realisasi tahun-tahun sebelumnya, namun tidak halnya untuk kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)/ Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang belum memuat perbandingan tersebut.
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- c) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan kualitas atas capaian kinerja, seperti pada indikator persentase prasarana jalan yang terpenuhi sebesar 57,81% belum disajikan data/informasi yang rinci/dapat ditelusuri seperti data keterpenuhan terminal, ketersediaan perlengkapan jalan, sebagai data pembentuk dari indikator yang dimaksud, serta faktor keberhasilan/kegagalan hanya dirinci berdasarkan bidang-bidang belum dirinci berdasarkan per masing-masing kinerja individu.

4) Evaluasi internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi kinerja Internal Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 20,50 dari nilai maksimal 25,00.





Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala untuk pemantauan kinerja eselon III, IV dan Staf yang termuat dalam 1 (satu) laporan kinerja, namun pada laporan kinerja tersebut belum memuat rekomendasi dan atasan langsung, dan tindak lanjut triwulan berikutnya, dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian Kinerja.

c. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Memastikan penanggung jawab yang telah ditetapkan dalam IKU menjadi pedoman dalam menetapkan perjanjian kinerja dan tidak diampu lebih dari satu orang;
- 2) Memastikan Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja dengan dokumen penganggaran telah selaras dan dapat diukur;
- 3) Penetapan target pada perjanjian kinerja agar memperhatikan realisasi capaian tahun sebelumnya dan/atau target Renstra;
- 4) Memuat kinerja/sasaran dari program sampai dengan level sub kegiatan di dalam dokumen perencanaan;
- 5) Hasil penyusunan penjenjangan kinerja agar dituangkan dalam dokumen perencanaan;
- 6) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan setiap pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala;



- 7) Melakukan pengukuran secara berjenjang yang dituangkan dalam laporan kinerja per individu dengan memuat kesepakatan rekomendasi dan tindak lanjut antara pemberi dan penerima amanah, sebagai upaya memudahkan dalam melakukan pemantauan/ tindak lanjut di triwulan selanjutnya untuk mencapai target organisasi diakhir tahun;
- 8) Menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, serta realisasi tahun-tahun sebelumnya, serta realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level provinsi/nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 9) Menyusun laporan kinerja tahunan tidak hanya pada jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) namun sampai dengan jabatan pengawas (eselon IV).

A.9.2 TINDAK LANJUT

Berdasarkan rekomendasi dari Surat Inspektorat Daerah Nomor 7000.1.2/82/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan reviu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 berkaitan dengan pemutakhiran sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terbit dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 pada tanggal 24 Juli 2024 dengan catatan perubahan sebagai berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1QIWDNF1ICTWwThIk5QuDIwnDp7PV-yUe?usp=drive_link





- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka merumuskan upaya dan solusi terhadap setiap faktor penghambat pada sub kegiatan yang dituangkan dalam monitoring rencana aksi per Triwulan Tahun 2024.
- 3) Memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi (Simondalev) sebagai pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan dimaksudkan agar kegiatan pembangunan terlaksanakan secara: tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Pada Tahun 2024 penginputan realisasi kinerja dilakukan oleh masing-masing operator pada bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar agar sesuai dengan tenggat waktu dari Bappedalitbang tanggal 05 setiap bulan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dalam rapat setiap triwulan untuk menentukan tindak lanjut perbaikan pada sub kegiatan berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja.
- 5) Telah melaksanakan rapat internal lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada Hari Selasa, 11 Juli 2024 perihal pembahasan rekomendasi hasil penilaian AKIP Tahun 2024.
- 6) Melakukan monitoring terhadap realisasi fisik dan keuangan dalam rangka penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan waktu pelaksanaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.128.478.967 dan realisasi sebesar Rp



11.276.427.090 dengan capaian sebesar 87,58 %. Rincian belanja Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Realisasi Jenis Belanja

Tabel 3.8
Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	Rp12.875.051.432	Rp11.276.427.090	87,58%
	a. Belanja Pegawai	Rp5.936.743.972	Rp4.826.939.765	81,31%
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp6.938.307.460	Rp6.449.487.325	92,95%
	c. Belanja Hibah	Rp0	Rp0	0%
2.	Belanja Modal	Rp5.253.427.535	Rp5.201.966.590	99,02%
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.463.481.635	Rp3.417.394.400	98,67%
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.774.945.900	Rp1.769.666.000	99,70%
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp15.000.000	Rp14.906.190	99,37%
	d. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0	Rp0	0%

- Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.9
Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp5.465.358.314	Rp5.103.185.809	93,37%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.748.975.613	Rp1.723.805.600	98,56%
3	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp237.164.500	Rp235.141.100	99,15%
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.386.933.313	Rp1.368.094.500	98,64%
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp31.633.800	Rp29.045.000	91,82%
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp93.244.000	Rp91.525.000	98,16%
7	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp103.559.428	Rp100.388.600	96,94%
8	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp50.843.928	Rp48.457.000	95,31%
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Rp52.715.500	Rp51.931.600	98,51%



	Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp18.768.000	Rp17.680.900	94,21%
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp18.768.000	Rp17.680.900	94,21%
12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp945.266.600	Rp929.851.158	98,37%
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp399.569.900	Rp394.355.500	98,69%
14	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp499.372.700	Rp489.207.158	97,96%
15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp46.324.000	Rp46.288.500	99,92%
16	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp2.159.300.773	Rp2.147.946.861	99,47%
17	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp378.734.000	Rp376.433.961	99,39%
18	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp30.000.000	Rp29.908.950	99,70%
19	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp4.996.000	Rp4.390.000	87,87%
20	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp1.211.718.265	Rp1.207.276.450	99,63%
21	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp533.852.508	Rp529.937.500	99,27%
22	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp23.497.000	Rp23.047.000	98,08%
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Rp4.998.000	Rp4.998.000	100,00%
24	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	Rp14.999.000	Rp14.549.000	97,00%
25	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalin	Rp3.500.000	Rp3.500.000	100,00%
26	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp37.000.000	Rp36.600.000	98,92%
27	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp37.000.000	Rp36.600.000	98,92%
28	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp413.990.900	Rp108.959.500	26,32%
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp31.538.000	Rp29.138.000	92,39%



30	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp382.452.900	Rp79.821.500	20,87%
31	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.000.000	Rp14.906.190	99,37%
32	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.000.000	Rp14.906.190	99,37%
33	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp1.847.997.900	Rp1.836.428.700	99,37%
34	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp319.722.200	Rp317.712.200	99,37%
35	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp304.996.200	Rp303.364.200	99,46%
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp14.726.000	Rp14.348.000	97,43%
37	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.528.275.700	Rp1.518.716.500	99,37%
38	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp51.499.400	Rp48.377.000	93,94%
39	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.246.776.500	Rp1.241.920.500	99,61%
40	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp229.999.800	Rp228.419.000	99,31%
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp10.815.122.753	Rp9.538.779.171	88,20%
42	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp36.966.000	Rp36.713.700	99,32%
43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.435.000	Rp8.351.800	99,01%
44	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp13.657.000	Rp13.599.400	99,58%
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.870.000	Rp4.846.000	99,51%
46	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.004.000	Rp9.916.500	99,13%
47	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.929.056.692	Rp4.824.909.365	81,38%



48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.808.473.972	Rp4.724.589.765	81,34%
49	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp111.780.000	Rp92.160.000	82,45%
50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp8.802.720	Rp8.159.600	92,69%
51	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100,00%
52	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100,00%
53	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp49.883.600	99,77%
54	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp50.000.000	Rp49.883.600	99,77%
55	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp353.157.300	Rp346.427.666	98,09%
56	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp20.298.800	Rp20.151.000	99,27%
57	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp20.604.000	Rp17.416.000	84,53%
58	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp14.024.500	Rp11.782.500	84,01%
59	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp10.750.000	Rp10.454.000	97,25%
60	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp287.480.000	Rp286.624.166	99,70%
61	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.175.624.935	Rp2.147.672.000	98,72%
62	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.002.724.935	Rp1.975.700.000	98,65%
63	Pengadaan Mebel	Rp56.124.000	Rp56.064.000	99,89%
64	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp116.776.000	Rp115.908.000	99,26%
65	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.745.275.026	Rp1.611.061.164	92,31%
66	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp74.440.026	Rp68.579.864	92,13%
67	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.670.835.000	Rp1.542.481.300	92,32%
68	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp517.842.800	Rp514.911.676	99,43%
69	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp38.990.000	Rp38.939.400	99,87%
70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp351.390.000	Rp350.541.276	99,76%
71	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.620.000	Rp26.602.000	92,95%
72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp98.842.800	Rp98.829.000	99,99%

- Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja



Tabel 3.10

Realisasi anggaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	86,67	89,99	103,83	Rp18.128.478.967	Rp16.478.393.680	90,90
2	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	76	87	114,58	Rp10.815.122.753	Rp9.538.779.171	88,20
3	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	100	100	100	Rp36.966.000	Rp36.713.700	99,32

		mutu						
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	Rp5.929.056.692	Rp4.824.909.365	81,38
5	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Presentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik daerah tepat waktu.	100	100	100	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100,00
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	Rp50.000.000	Rp49.883.600	99,77
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	Rp353.157.300	Rp346.427.666	98,09

8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100	100	Rp2.175.624.935	Rp2.147.672.000	98,72
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	100	100	Rp1.745.275.026	Rp1.611.061.164	92,31
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Rp517.842.800	Rp514.911.676	99,43
11	Terpenuhinya Prasarana Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75	61,5	82	Rp1.852.535.041	Rp1.824.194.200	98,47

12	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Presentase prasarana transportasi sungai dan danau yang Standar	75	75	100	Rp1.528.275.700	Rp1.518.716.500	99,37
13	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	80	75	93,75	Rp1.748.975.613	Rp1.723.805.600	98,56
14	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	70	70	100	Rp1.528.275.700	Rp1.518.716.500	99,37
15	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	75	75	100	Rp1.748.975.613	Rp1.723.805.600	98,56
16	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39	0,39	100	Rp2.238.565.773	Rp2.225.274.761	99,41
17	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39	0,39	100	Rp2.159.300.773	Rp2.147.946.861	99,47

18	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	70	70	100	Rp23.497.000	Rp23.047.000	98,08
19	Meningkatnya Ketaatan dan keselamatan Berlalu Lintas	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	84,44	86	101,85	Rp37.000.000	Rp36.600.000	98,92
20	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan yang Layak	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	70,11	77,5	110,54	Rp1.374.257.500	Rp1.053.716.848	76,68
21	Meningkatnya sarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	30	30	100	Rp1.847.997.900	Rp1.836.428.700	99,37
22	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	75	75	100	Rp1.528.275.700	Rp1.518.716.500	99,37

23	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan sungai dan danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	50	50	100	Rp319.722.200	Rp317.712.200	99,37
24	Meningkatnya Dermaga, Shelter dan Fasilitas Perlengkapan Sungai dan Danau serta perencanaan dan pengawasan ASD	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	67	67	100	Rp1.528.275.700	Rp1.518.716.500	99,37
25	Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	37,5	25	66,67	Rp413.990.900	Rp108.959.500	26,32
26	Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	100	100	100	Rp15.000.000	Rp14.906.190	99,37

27	Meningkatnya Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	100	100	100	Rp945.266.600	Rp929.851.158	98,37
28	Terpenuhinya Terminal sesuai Standar Pelayanan Minimum	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	59	65,62	111,22	Rp103.559.428	Rp100.388.600	96,94
29	Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Tertib Untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100	80,64	80,64	Rp18.768.000	Rp17.680.900	94,21



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari laporan yang telah disusun maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah mencapai target, dengan capaian sangat tinggi sebesar 93,10%, dan capaian tinggi 6,89%. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yaitu **“Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi”** dengan indikator Rasio Konektivitas dengan target 86,67 rasio dan telah terealisasi 89,99 rasio sehingga memperoleh predikat capaian sangat tinggi dengan nilai 103,83%.

Adapun untuk capaian sasaran dinas ialah sebagai berikut.

1. Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar 97 %.
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi sebesar -1,37 %.
3. Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar sebesar 140 %.

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.478.393.680 dengan anggaran sebesar Rp 18.128.478.967 dan capaian sebesar 90,9 persen.

B. SARAN - SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna yang lebih maksimal.
- 2) Untuk mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran hendaknya para pelaku di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan menyatukan visi dan misi serta saling menunjang satu dengan yang lainnya.



- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan menambah jumlah SDM penguji Kendaraan Bermotor.
- 4) Membuat konsep SK trayek Angkutan Sungai dan Danau di Kab. Banjar dan mengusulkan ke bagian hukum setda Kab.Banjar.
- 5) Mencoba untuk menelusuri dan sedang diupayakan untuk melakukan koodinasi dan konsultasi dengan pihak terkait di provinsi perihal kejelasan peraturan tentang trayek.
- 6) Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum, kedepannya dishub melakukan koordinasi dengan sopir angkutan umum yang ada di Kabupaten Banjar untuk menerapkan usulan dari Dinas Perhubungan agar angkutan umum yang ada stand by dalam rangka menyediakan moda transportasi umum bagi para jemaah.
- 7) Membentuk kepengurusan organisasi angkutan darat (Organda) di Kabupaten Banjar yang akan menjembatani antara kepentingan sopir angkot dengan dishub Kab. Banjar. Organisasi Angkutan Darat (Organda) dibentuk bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan jalan di Kabupaten Banjar menjadi kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi.
- 8) Menambah angkutan feeder untuk konektivitas masyarakat.
- 9) Penambahan SDM yang Ahli di Bidang IT atau Pelatihan SDM yang ada di Bidang IT untuk mengelola SISPRAHUB
- 10) Mengusulkan dan Menyediakan Anggaran untuk Membuat Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perlengkapan Jalan.
- 11) Menyediakan anggaran untuk Peningkatan Kualitas dan Keahlian SDM di Bidang Sarpras dengan Bimtek dan Pengadaan Barang dan Jasa.
- 12) Menyediakan Anggaran untuk pekerjaan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Kinerja Jaringan LLAJ.





- 13) Menyediaakn Anggaran dengan Skala Prioritas berupa Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Sesuai Kebutuhan Pada Setiap Jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- 14) Koordinasi dengan BKDPSPDM dalam Penganggaran Diklat & Bimtek dalam Peningkatan SDM di Bidang SarPras baik Diklat PPNS atau Diklat lainnya di Bidang Perhunungan.
- 15) Menyediakan anggaran tambahan untuk pemenuhan perlengkapan kantor seperti Komputer, Printer dan ATK serta Kursi dan Meja.
- 16) Penyediaam Anggaran Tambahan dengan Pengadaan Alat Survey Sarana & Prasarana, serta Jaringan dan Fasilitas Perhubungan seperti Drone, Speed Gun, Walking Measure, Counter, dan alat survey lainnya.
- 17) Menguslkan dan Menyediakan Anggaran Pada Sub Kegiatan berupa Pekerjaan untuk Mendukung Permohonan tersebut seperti Pembuatan Kajian SID, FS, DED, RAB dan Data Dukung Lainnya.
- 18) Menyediakan anggaran atau pemenuhan perlengkapan ITS/ATCS yang kurang (Penganggaran Pembuatan CCROOM, CCTV Pemantau Arus Lalu Lintas, dan koneksi Internet yang Handal).
- 19) Menyediakan Anggaran Tambahan SDM yang Mahir dan Membidangi bidang IT (SDM Pemrograman dan Elektro).
- 20) Menyediakan Anggaran Diklat Diklat Teknis Bidang Lalu Lintas (Diklat PPNS, Teknisi APILL, Andalalin, dll).
- 21) Menyediakan Anggaran untuk Penghimpunan Database atau Study Bidang Lalu Lintas (Tatralok, Rencana Induk, DRK, LHR, Trayek, dll).
- 22) Menyediakan Anggaran Pengadaan Faskes, Water Barrier, Traffic Cone, Pick Up, Mobil Patwal dan Kendaraan R2 untuk Patroli.
- 23) Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Kegiatan Pengamanan dan Kegiatan Razia.





- 24) Menyediakan Anggaran untuk Melakukan Sosialisasi Keselamatan dan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Umum.
- 25) Menyediakan Anggaran untuk pengadaan alat-alat survey lalu lintas (Drone, Walking Maesure, GPS, Speed Gun, Counter, dll).
- 26) Menyediakan Anggaran Tambahan untuk Pemenuhan Perlengkapan Kantor (Komputer, Printer dan ATK).
- 27) Menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan konsultasi teknis Bidang Lalu Lintas dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal.
- 28) Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek/ Diklat Teknis Dasar Perhubungan Darat dan Pelatihan Pengaturan Lalu Lintas.
- 29) Melaksanakan inovasi yang berbasis IT dan data elektronik (inovasi Langkar).
- 30) Memberikan anggaran pengadaan Komputer.
- 31) Melaksanakan kolaborasi bersama BKD untuk meningkatkan SDM Penguji dan menambah Jumlah Penguji.
- 32) Anggaran langsung pada DPA Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





LAMPIRAN

1. Pohon kinerja dan cascading ([Link Google Drive](#))
2. PK tahun 2024 ([Link Google Drive](#))

